

# PEMBERDAYAAN SOSIAL SEBAGAI PROSES "MEMAMPUKAN" RUMAHTANGGA MISKIN DI PEDESAAN

## SOCIAL EMPOWERMENT PROCESS AS "ENABLE" HOUSEHOLD IN RURAL POOR

Widiyanto

Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian UNS

Email: widiuns@gmail.com

### Abstract

This article tries to describe how the role of social empowerment in an effort to "enable" poor rural households. It is based on the likelihood empowerment program without first understand in detail what? Why are they poor and how the effort out of poverty ?. So many important aspects that actually needed to support the life of the community is not touched (physical capital, financial, human, social, cultural, natural, and others). Yet this is where the real important portion that should be played by the agent of change in an effort to expand access to essential assets required by poor households and improve the ability to manage the assets owned.

*Keywords: empowerment, poor households, the asset*

### Abstrak

Tulisan ini berusaha menguraikan bagaimana peran pemberdayaan social dalam upaya "memampukan" rumahtangga miskin di pedesaan. Hal ini didasarkan pada kecenderungan program pemberdayaan yang dilakukan tanpa terlebih dahulu memahami secara detail siapa? Mengapa mereka miskin dan bagaimana upaya keluar dari kemiskinan?. Sehingga banyak aspek penting yang sebenarnya diperlukan dalam mendukung kehidupan masyarakat justru tidak tersentuh (modal fisik, financial, SDM, social, budaya, alam, dan lainnya). Padahal disinilah sebenarnya porsi penting yang harus diperankan oleh *agent of change* dalam upaya memperluas akses terhadap asset-asset penting yang diperlukan oleh rumahtangga miskin dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola asset yang dimiliki.

*Kata kunci: pemberdayaan, rumahtangga miskin, asset*

### PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan menjadi isu penting semenjak pemerintahan kolonial hingga masa reformasi. Berbagai upaya juga dilakukan dalam rangka menanggulangi kemiskinan baik oleh pihak pemerintah

maupun dari petani sendiri (dalam konteks masyarakat pedesaan). Pada pemerintahan kolonial Belanda, upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan beberapa tindakan , seperti: pembukaan hutan menjadi

tanah pertanian, penanaman tanah baru, intensifikasi penggunaan tanah, perbaikan system irigasi, perbaikan cara bertanam dan penggunaan benih terpilih, dan pembukaan peluang kerja di perkebunan-perkebunan besar Orang Eropa, namun sampai akhir pemerintahan kolonial Belanda tahun 1942 keadaan perekonomian pedesaan tetap tidak membaik, bahkan mungkin mundur, kecuali di desa-desa dekat perkebunan besar (Boeke, 1948 *yang dikutip* Marzali, 2003).

Setelah zaman merdeka keadaan perekonomian petani pedesaan tetap tidak berubah, bahkan pada zaman “ekonomi terpimpin” (1959-1965), keadaan tersebut lebih menunjukkan kemunduran. Pada zaman Soeharto (1966) keadaan perekonomian Indonesia pada umumnya termasuk daerah pedesaan berubah agak membaik. Kebijakan pembangunan pertanian beralih dari usaha pembenahan keseimbangan antara “*land, labour dan kapital*” langsung ke modernisasi dan intensifikasi. Teknologi pertanian pangan baru (Panca usaha tani, Sapta usaha tani, Bimas, Inmas), mulai digalakkan sejak tahun 1963 (Mubyarto, 1987 *yang dikutip* Marzali, 2003)

Swasembada beras pada tahun 1984 merupakan prestasi, namun demikian dibalik itu sebenarnya petani kayalah yang menikmati keuntungan lebih besar, sementara petani lokal dan buruh tani terdesak keluar sektor pertanian dan terpaksa mencari nafkah di sektor informal sampai di daerah perkotaan. Bahkan secara ekstrim, Husken (1998) menyatakan bahwa pedesaan telah mencapai tingkat komersialisasi sedemikian rupa, sehingga langsung lebih terlibat dalam percaturan ekonomi yang lebih luas di luar wilayahnya atau disebut cenderung ke kapitalisme.

Setelah krisis menerpa Indonesia pada tahun 1997, yang ditandai jatuhnya rezim Soeharto dan dimulainya orde reformasi keadaan menjadi semakin tidak menentu. Jumlah masyarakat miskin semakin meningkat pada tahun 1996 sebesar 34,01 juta menjadi 39,05 juta pada tahun 2006. Pada bulan Maret 2006, sebagian besar (63,41 persen) penduduk miskin berada di daerah pedesaan (BPS, 2006).

Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat semenjak awal kemerdekaan. Dalam bidang pendidikan terutama diarahkan kepada pemberantasan buta huruf yang tak

### ***Pemberdayaan, rumahtangga miskin, asset, Widiyanto***

terbatas di sekolah formal tetapi juga di luar sekolah, di era Orde Baru lebih dikenal dengan wajib belajar 9 tahun. Di Bidang kesehatan, sejak 19-70an pemerintah meluncurkan berbagai program pelayanan hingga tingkat kecamatan (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu agar lebih mudah terjangkau oleh masyarakat desa. Pada awal 1990-an pembangunan pusat kesehatan masyarakat meningkat lebih tinggi daripada rumah sakit. Penempatan bidan di desa yang mendidik kader-kader dari kalangan penduduk desa sendiri, dan mendampingi kader dalam kegiatan rutin posyandu, menunjukkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Kaderisasi semacam ini meningkatkan peluang keberlanjutan program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Program Keluarga Berencana juga merupakan program strategis untuk mengurangi tingkat kemiskinan keluarga.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan juga diluncurkan berbagai Inpres, seperti Inpres Kesehatan, Inpres Perhubungan, Inpres Pasar, Bangdes, Inpres Desa Tertinggal (IDT). Program-program pemberdayaan lainnya juga dilakukan seperti Program Pembinaan dan Peningkatan Pendapatan

Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Program Tabungan dan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Takesra-Kukesra), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), PNPM Mandiri dan lainnya.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah menurut hemat penulis lebih banyak bermain pada satu aspek penting yaitu **kredit**. Hal ini disadari bahwa melalui kredit diharapkan masyarakat berdaya secara finansial dan pada gilirannya mampu meningkatkan standar hidupnya. Benarkah masyarakat hanya membutuhkan kredit (modal finansial)? Pemahaman mengenai bagaimana masyarakat bertahan hidup juga terkadang *luput* dari perhatian *agent of change* sehingga terkadang program yang 'diberikan' tidak selalu cocok dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk melakukan kegiatan pemberdayaan, hal penting yang harus dilakukan adalah memahami rumahtangga miskin yang akan menjadi subjek pemberdayaan. Menurut Wiradi, memahami orang miskin harus bersifat komprehensif, dengan berbagai elemen penting

yang harus dipahami secara tepat dan benar, seperti: (a) siapa orang miskin itu?; (b) di mana mereka tinggal?; (c) mengapa mereka miskin?; (d) mengapa mereka tetap miskin?; (e) bagaimana persepsi mereka mengenai apa yang dimaksud dengan “miskin” ?; dan (f) bagaimana usaha mereka sendiri untuk mengatasinya?. Berbagai pertanyaan-pertanyaan tersebut sering luput dari serentetan kegiatan ‘pemberdayaan’ yang dilakukan oleh pemerintah.

Mendasarkan diri pada uraian diatas, maka tulisan ini akan berusaha memaparkan: (1) bagaimana upaya ‘rumah tangga miskin’ dalam bertahan dan meningkatkan standar hidupnya?; (2) bagaimana posisi pemberdayaan sosial dalam aktivitas penanggulangan kemiskinan ; dan (3) bagaimana implikasi kebijakan yang dapat dilakukan ?.

### **RUMAHTANGGA MISKIN DAN CARA BERTAHAN HIDUP**

Banyak kajian yang dilakukan terkait dengan bagaimana cara masyarakat dalam upaya bertahan hidup. Penelitian White (1973) yang dikutip Sajogyo (1990) menyatakan bahwa dalam kondisi lahan yang semakin sempit, rumah tangga petani bertahan hidup dengan

melakukan kegiatan nafkah di luar pertanian. Beberapa tesis White adalah: (1) terjadi (sebagian) proses “orang terdorong ke luar (pertanian), imbalan di luar pertanian lebih rendah, orang menjalaninya karena terpaksa; dan (2) (sebagian lain) proses “orang tertarik ke dalam (nafkah bukan pertanian)”, dimana imbalan di luar pertanian yang lebih baik. Ada kecenderungan rumah tangga di lapisan bawah (miskin) yang terkena proses “terdorong keluar” sebagai suatu strategi bertahan hidup. Sajogyo (1998) menyebut sebagai pola nafkah ganda.

Ada berbagai cara yang berbeda yang dilakukan petani dalam menjaga kelangsungan hidupnya. *Pertama*, rumah tangga yang atau mengusahakan tanah pertanian luas, yang menguasai surplus produk pertanian diatas kebutuhan hidup mereka. Surplus ini seringkali dimanfaatkan untuk membiayai pekerjaan di luar sector non-pertanian, dengan imbalan penghasilan yang relative tinggi pula. Pada golongan pertama, strategi nafkah yang mereka terapkan adalah *strategi akumulasi* dimana hasil pertaniannya mampu diinvestasikan kembali baik pada sector pertanian maupun non pertanian. *Kedua*,

### ***Pemberdayaan, rumahtangga miskin, asset, Widiyanto***

rumahtangga usaha tani sedang (usahatani hanya mampu memenuhi kebutuhan subsisten). Mereka biasanya bekerja pada sector non pertanian dalam upaya melindungi diri dari gagal panen atau memberikan sumber pendapatan yang berkelanjutan mengingat usaha pertanian bersifat musiman. Strategi mereka ini dapat disebut sebagai *strategi konsolidasi*. *Ketiga*, rumah tangga usaha tani gurem atau tidak bertanah. Biasanya mereka bekerja dari usaha tani ataupun buruh tani, dimana penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar. Rumahtangga ini akan mengalokasikan sebagian dari tenaga kerja mereka tanpa modal, dengan imbalan yang rendah-ke dalam kegiatan luar pertanian. Pada rumahtangga pada golongan ketiga ini menerapkan strategi bertahan hidup (*survival strategy*) (White, 1990).

Pada posisi bertahan hidup, tanpa surplus pertanian, dengan modal kecil, rumahtangga petani memasuki nafkah di luar pertanian, dengan imbalan (Rp/jam) yang lebih rendah dari kerja pertanian. Dalam hal usaha sendiri yang mereka bisa bina di luar pertanian, mereka tak menghitung jumlah masukan jam kerja sendiri/rumahtangga, menjurus

ke *eksploitasi diri*. Lebih jauh Sajogyo (1990) membandingkan pola strategi nafkah rumahtangga desa antara lapisan atas dan lapisan bawah. Pada keluarga lapisan atas yang bermodal kuat dengan luas lahan >0,5 ha, punya surplus pertanian yang membesar akibat revolusi hijau dan dari surplus itu mampu memodali usaha luar pertanian. Sementara pada rumahtangga lapisan bawah (miskin tak bermodal) yang menunjukkan strategi "bertahan": bagi mereka penghasilan total pada suatu waktu lebih penting, biarpun sebagian dari pekerjaan yang berimbangan lebih rendah.

Bertitik tolak dari pemikiran Sajogyo, Hardjono (1990) berusaha mengkaitkan antara tanah, pekerjaan, dan nafkah di pedesaan Jawa Barat. Untuk bertahan hidup rumah tangga petani melakukan upaya ekstensifikasi dan diversifikasi pertanian disamping adanya nafkah di luar sector pertanian. Beberapa penelitian lain juga mencoba menelusuri beragam upaya bertahan hidup masyarakat pedesaan dengan setting ekologi yang berbeda. Setting ekologi: (1) pegunungan: Dharmawan (1994 dan 2001), Efendi (2004), Widiyanto (2009); (2) Nelayan: Iqbal (2004), Lestari (2005); (3) masyarakat sekitar hutan:

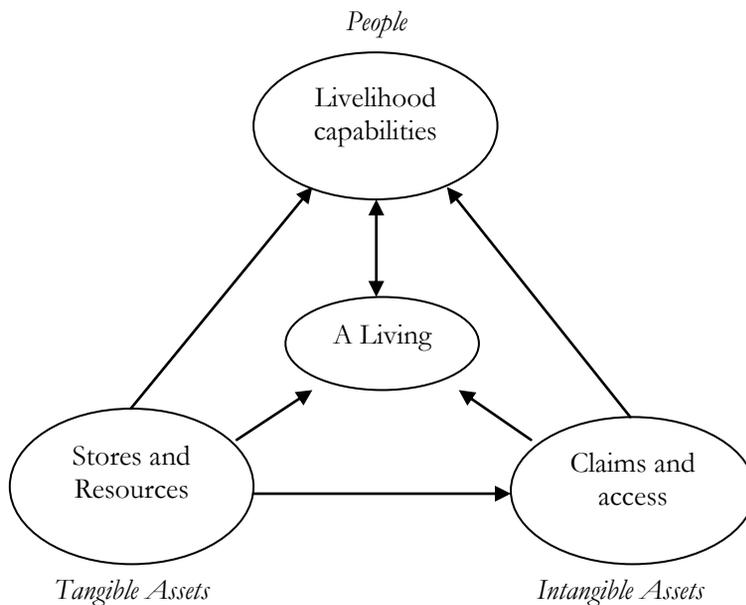
Purnomo (2005); (4) rumahtangga miskin perkotaan: Musyarofah (2006); (5) perkebunan rakyat (teh dan tebu): Masithoh (2005). Beberapa penelitian tersebut juga melihat basis nafkah yang dipilahkan berdasarkan pada pentagon asset (modal alam, modal fisik, modal SDM, modal financial, dan modal social).

**DIMENSI PEMBERDAYAAN SOSIAL  
DALAM RUANG KEHIDUPAN  
RUMAHTANGGA MISKIN  
Peran Asset (modal) bagi  
rumahtangga miskin**

Strategi nafkah (upaya bertahan hidup) meliputi asset (modal alam, modal fisik, modal SDM, modal financial, dan modal social), aktifitas, dan akses terhadap asset-aset tersebut yang dikombinasikan untuk menentukan kehidupan bagi individu maupun rumah tangga (Conway dan Chambers, 1992). Modal alam (*natural capital*) terdiri dari tanah, air, dan sumberdaya biologi yang digunakan oleh manusia sebagai sarana bertahan hidup. Modal alam lebih banyak mengacu pada sumber daya lingkungan (*environmental resources*) baik yang dapat diperbaharui atau tidak. Modal Fisik (*Physical Capital*) menyangkut modal yang diciptakan oleh proses ekonomi

produksi seperti: bangunan, irigasi, jalan, mesin, dan lainnya. Modal sumber daya manusia (*Human Capital*) mengacu kepada sumber daya tenaga kerja yang ada pada rumah tangga seperti: pendidikan, keterampilan, dan kesehatan. Modal financial (*Financial Capital and substitutes*) mengacu kepada persediaan uang yang telah diakses oleh rumah tangga misalnya: tabungan, akses untuk mendapatkan kredit dalam bentuk bantuan. *Modal Sosial (Social Capital)* mencakup adanya kepercayaan (*trust*), *clientization*, hubungan kekerabatan, suku, daerah asal, almamater, dan lain sebagainya (Ellis, 2000). Selain lima asset yang disebut sebagai *pentagon asset*, Odero (2007) menambahkan satu asset penting lainnya yaitu asset informasi (*information capital*).

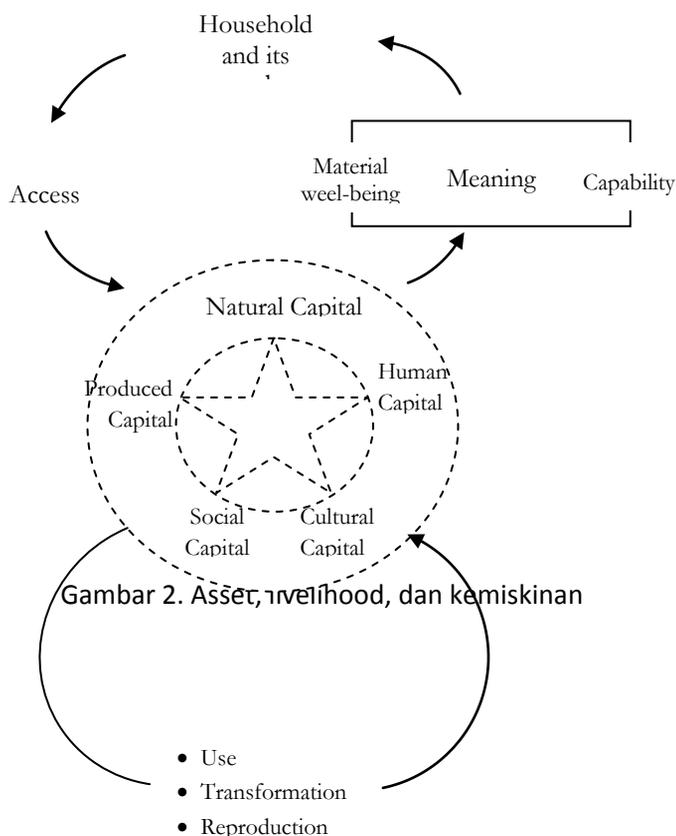
Menurut Chambers (1995), bahwa strategi nafkah rumahtangga lebih mengacu kepada sarana untuk memperoleh kehidupan, termasuk kemampuan berupa *tangible assets* dan *intangible assets*. Inti dari livelihood dapat dinyatakan sebagai kehidupan (*a living*). Melalui campur tangan manusia, asset-asset nyata (*tangible assets*) dan asset tidak nyata (*intangible assets*) berkontribusi terhadap kehidupan (*a living*) (lihat gambar 1).



Gambar 1. Komponen dan bagan alir nafkah rumah tangga

*Tangible assets* di kendalikan oleh rumah tangga dalam dua bentuk, yaitu: (1) simpanan (*store*), contoh: stok makanan, simpanan berharga seperti emas dan perhiasan, tabungan dan (2) dalam bentuk sumber daya (*resources*) seperti: lahan, air, pohon, ternak, peralatan pertanian, alat dan perkakas domestic. *Intangible assets* terdiri dari *claims* yang dapat dibuat untuk material, moral atau pendukung lainnya dan *access* adalah kesempatan untuk menggunakan sumberdaya, simpanan atau jasa, atau untuk memperoleh informasi, material, teknologi, kesempatan kerja, makanan atau pendapatan.

Dalam kaitan dengan asset- atau yang sering disebut sebagai *capital*-tidak secara sederhana sumber daya (*resources*) yang ada langsung digunakan di dalam membangun nafkah (*livelihood*). Berbagai asset yang ada akan menentukan bagaimana strategi nafkah dibentuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karena asset (*capital*) tersebut memberikan orang kemampuan (*capability*). Melalui berbagai kemampuan tersebut akan membuat kehidupan menjadi lebih berarti dan berkelanjutan (Bebbington, 1999) (lihat gambar 2.).



**Peran Pemberdayaan dalam proses “pemampuan” rumah tangga miskin**

Pemahaman pemberdayaan sangat beragam tergantung kepada konteks dan level kajian (individu, kelompok, komunitas) (Alsop *et al*, 2006). Dalam tulisan ini, penulis mencoba merujuk pada salah satu definisi, tentunya yang sesuai dengan topic kajian yang menjadi focus dari tulisan ini. Narayan (2002: 14) mencoba mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut: *Empowerment is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with,*

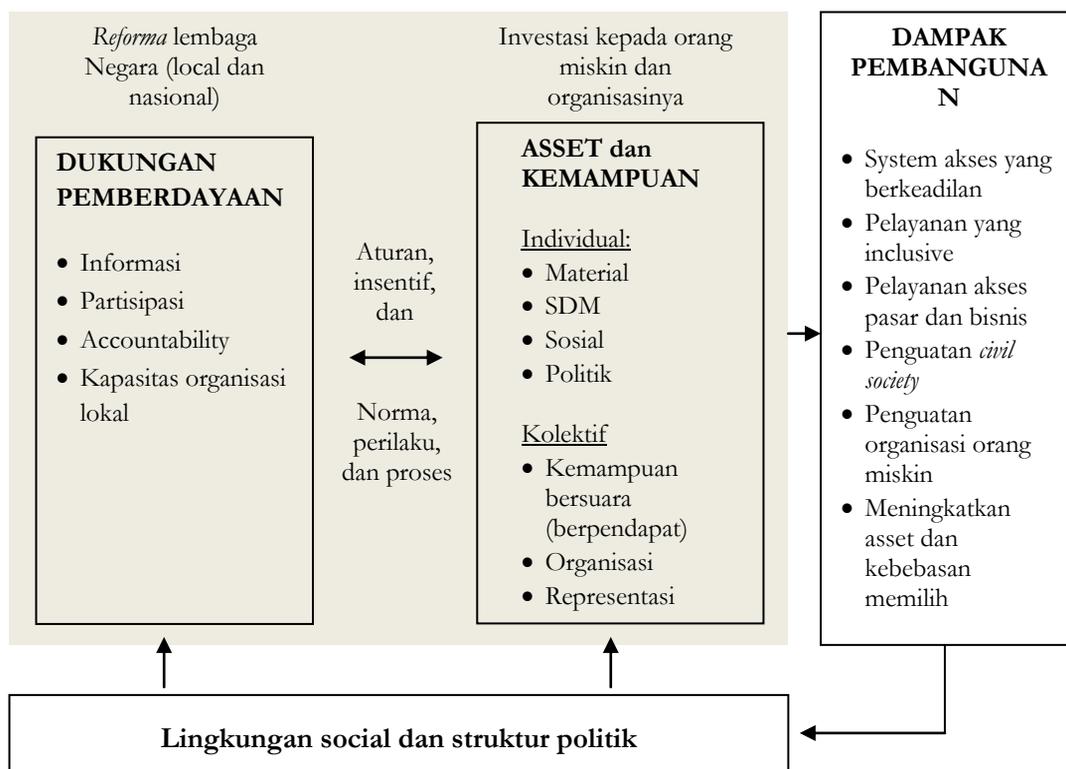
*influence, control, and hold accountable institutions that affect their lives (Narayan, 2002: 14)*

Lebih lanjut Narayan (2002 : 18-22) menyatakan bahwa untuk meningkatkan kebebasan memilih dan bertindak (*freedom of choice and action*) maka pemberdayaan harus mendukung empat elemen penting, yaitu: (1) akses terhadap informasi; (2) partisipasi; (3) accountability; dan (4) kapasitas organisasi local. Melalui keempat elemen pemberdayaan tersebut, akan berdampak kepada akses terhadap asset-asset penting masyarakat dan kemampuan menge-

**Pemberdayaan, rumahtangga miskin, asset, Widiyanto**

lola asset sehingga pada akhirnya akan berdampak pada: (1) perbaikan pada system akses yang berkeadilan; (2) pelayanan yang inclusive; (3) pelayanan akses pasar dan bisnis; (4)

penguatan *civil society*; (5) penguatan organisasi orang miskin; (6) meningkatkan asset dan kebebasan memilih (lihat gambar 3)



Gambar 3. Kerangka Pemberdayaan; dikutip dari Narayan (2002: 23)

Mendasarkan diri pada definisi pemberdayaan dan kerangka pemberdayaan tersebut, semakin menunjukkan bahwa peran pemberdayaan dalam penanggulangan kemiskinan adalah “memampukan” orang miskin dalam memperluas mengakses terhadap sumber daya baik sumberdaya manusia, alam, fisik, financial, social, budaya dan kemampuan mengelola sumberdaya

(asset) tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan baik pada level individu, kelompok, maupun komunitas.

Kata memperluas asset dan kemampuan memiliki makna bahwa pada hakikatnya masyarakat miskin sesungguhnya telah memiliki asset dan kemampuan. Namun demikian keterbatasan terhadap akses sumber daya mengakibatkan asset dan

kemampuan yang dimiliki terbatas. Keterbatasan tersebut mengakibatkan kemiskinan dan untuk mengentaskan diri dari kemiskinan maka yang harus dilakukan adalah bagaimana memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperluas asset dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola asset-asset tersebut.

Ketika berbicara tentang memperluas akses, maka ranah kajian pemberdayaan tidak bisa melepaskan diri pada orang-orang yang *powerless* dan *powerfull*. Oleh karena itu makna “memampukan” disini mengandung arti bagaimana orang miskin yang *powerless* menjadi orang yang memiliki kemampuan dalam mendapatkan akses sumberdaya. Hal ini tentunya diperlukan suatu kebijakan sehingga akses dan control antara orang kaya dan orang miskin tidak timpang. Oleh karena itu, konteks partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan tentunya tidak hanya diperuntukkan bagi orang miskin saja tetapi juga bagi orang kaya.

#### **IMPLIKASI KEBIJAKAN**

##### **Ide Perluasan Akses Modal Alam (tanah) melalui BUBT**

Kemiskinan di pedesaan sangat berkaitan erat dengan tingkat

pendapatan yang berkorelasi erat dengan luas lahan yang dimiliki atau dikuasai. Permasalahannya adalah kepemilikan dan penguasaan lahan bagi petani semakin sempit. Menurut hasil sensus pertanian 1983 proporsi rumah tangga petani tak bertanah di Jawa ada 4,7 %, di daerah lainnya 6,5 %, untuk Indonesia secara keseluruhan 5,4 %. Petani pemilik lahan kurang dari seperempat hektar di Jawa 37,9 %, di daerah lain 13,7 % dan Indonesia keseluruhan 28,2 %. Sedangkan petani pemilik lahan kurang dari setengah hektar di Jawa 59,9 %, di daerah lain 24,5 %, di Indonesia 46,1 %. Petani di Jawa tak bertanah dan pemilik lahan sempit di Jawa kurang lebih 63,6 %, di daerah lain 32 %, dan di Indonesia 51,5 % (Sayogyo yang dikutip Wariso, 1996).

Selain lahan yang sempit, jurang pemisah antara masyarakat level bawah dan level atas semakin lebar. Hal ini disebabkan, bagaimanapun masyarakat golongan atas menguasai asset sumber daya (social, financial, SDM, alami, fisik). Semakin luas lahannya maka semakin luas juga penguasaannya terhadap kegiatan *non-farm* nya, sementara pada petani lahan sempit maka usaha *non-farm*nya semakin sedikit karena keterbatasan kepemilikan modal.

Fenomena ini mengingatkan penulis pada pemikiran Sayogyo dalam kuliah umum menyoal: *pemikiran sosiologi di seputar kemiskinan* dimana salah satu pemikiran pentingnya adalah bahwa untuk mencapai kondisi kemakmuran menyaratkan adanya keadilan dalam alokasi sumber daya ekonomi dalam masyarakat. Salah satu pemikiran penting adalah adanya ide pembentukan Badan Usaha Buruh Tani (BUBT) sebagai bentuk *landreform* yang menyediakan dana bagi para buruh tani yang bersatu dalam kelompok Usaha Bersama (KuBe atau KSM).

Badan Usaha Buruh Tani (BUBT) ini dalam konteks pemberdayaan sebenarnya sebagai upaya memperluas asset terutama modal alam sehingga buruh tani mampu melakukan konsolidasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Mustahil peningkatan kesejahteraan diperoleh ketika akses terhadap lahan relative kecil atau bahkan tidak ada.

#### **Ide Perluasan Akses melalui Industri-alisasi Pedesaan**

Ide pemikiran Sajogyo tentang studi nafkah non pertanian merupakan spesifik untuk kondisi petani di Indonesia terutama di Jawa.

Berbagai penelitian ini dilatarbelakangi adanya keprihatinan atas gejala perubahan social terutama perubahan struktur agraria yang mendorong adanya upaya diversifikasi pekerjaan yang disebut sebagai nafkah ganda. Melihat fenomena tersebut, akhirnya muncul ide dan pemikiran industrialisasi pedesaan. Ide tersebut dipublikasikan melalui "symposium industrialisasi pedesaan" yang diselenggarakan atas kerjasama Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian IPB dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Jakarta pada tanggal 18 Desember 1989.

Industrialisasi pedesaan tersebut muncul dengan beberapa alasan, yaitu: (1) masih banyaknya jumlah penduduk yang menggantungkan diri pada sector pertanian, (2) sebagian besar berpenghasilan dari skala usaha yang kecil, dan (3) menurunnya daya absorpsi sector pertanian terhadap tenaga kerja. Melalui industrialisasi pedesaan tersebut paling tidak berfungsi untuk: (1) mendorong pertumbuhan pedesaan dengan mendiversifikasi sumber pendapatan; (2) meningkatkan dampak pertumbuhan permintaan di dalam atau di luar suatu daerah; (3) meningkatkan kesempatan kerja baru; (4) mendekatkan

hubungan fungsional antara pertanian dengan sector urban/industry; (5) meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan penerimaan industry; dan (6) mengurangi kemiskinan pedesaan, ekonomi uang, dan pasar (Usman *dalam* Sajogyo, 1990).

Ide pemikiran tentang industrialisasi pedesaan tersebut pada hakikatnya merupakan upaya untuk meningkatkan akses rumah tangga petani di pedesaan untuk mendapatkan berbagai asset sekaligus untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola asset-aset tersebut. Berbagai tujuan-tujuan industrialisasi pedesaan selalu mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain industrialisasi pedesaan merupakan salah satu implikasi dari pemberdayaan masyarakat pedesaan

Terlepas dari kedua pemikiran Sajogyo dan lainnya peran pemerintah sangat diperlukan dalam rangka menanggulangi kemiskinan pedesaan yang *pro-poor* yang berbasis kepada kesetaraan dalam perluasan asset dan kemampuan. Menurut Ellis (1998), beberapa peran pemerintah tersebut adalah: Pertama, *targeting*: untuk memberikan dukungan keamanan pendapatan dari kelompok sosial

yang paling rentan terhadap ketidakcukupan makan dan kemiskinan. Kedua; *reduce risk*: risiko terhadap kegagalan pasar, ketidakstabilan politik dan sosial, aturan hukum yang tidak memihak, risiko karena lemahnya informasi, risiko karena lemahnya infra struktur, dan lain sebagainya. Ketiga, *microcredit*: melalui kredit kecil diharapkan mampu memperluas peluang untuk memperoleh pendapatan. Keempat, *rural services*: sektor jasa dapat membantu memberikan lahan pekerjaan yang baru, termasuk jasa pemasaran, persediaan input, perbaikan mesin dan lain sebagainya. Kelima, *rural non-farm enterprise*, kebijakan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan peluang pekerjaan bagi masyarakat pedesaan. Keenam, *infra struktur*: fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kelancaran dalam melakukan kegiatan mencari nafkah. Ketujuh, *education*: pendidikan dianggap sebagai penyebab kemiskinan, oleh karena itu diperlukan pemberian akses pendidikan tidak hanya pendidikan formal tetapi juga non forma seperti berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan keahlian kepada rumah tangga desa miskin.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Mendasarkan diri pada pemikiran Chambers (1995), Bebbington (1999), dan Narayan (2002) bahwa peran penting *agent of change* dalam kegiatan pemberdayaan social adalah memperluas asset dan kemampuan dalam menegosiasikan, mengontrol, serta mengendalikan tanggung jawab lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Kelompok *Agent of change* meliputi berbagai pemangku kepentingan seperti: pemerintah selaku pemegang kebijakan, NGO, akademisi, dan elemen masyarakat lainnya.

Penggunaan kata “memperluas” asset memberikan sinyal bahwa sesungguhnya masyarakat miskin telah memiliki berbagai asset, namun karena berbagai hal asset tersebut bersifat terbatas. Oleh karena itu pemberdayaan social dapat berperan dalam rangka memfasilitasi masyarakat untuk mengakses berbagai asset (alam, SDM, financial, fisik, social, budaya, dan lainnya) dan memberikan kemampuan (*capability*) untuk mengelola asset tersebut sehingga mendorong kehidupan yang lebih baik.

Beberapa ide penting upaya pemberdayaan bagi petani adalah

adanya Badan Usaha Buruh Tani (BUBT) yang memberikan akses terhadap modal alam berupa tanah kepada buruh tani sehingga lebih berdaya dalam meningkatkan standar hidupnya. Selain itu juga dibentuknya industrialisasi pedesaan dalam upaya memberikan akses terhadap asset baik: financial, social, fisik, SDM, dan lainnya. Sementara menurut Ellis (1998) beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah: *targeting, reduce risk, microcredit, rural services, rural non-farm enterprise, infra structure, education*. Berbagai tindakan tersebut harus bertitik tolak kepada pemenuhan basic need-berupa asset-aset penting yang menunjang kehidupan petani seperti: modal alam, modal fisik, modal SDM, modal financial, dan modal social- dan kesempatan yang sama dalam mengakses sumberdaya ekonomi lainnya.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka beberapa saran yang dapat penulis ajukan antara lain:

1. Aktivitas pemberdayaan social haruslah selalu diawali dengan memahami orang miskin secara komprehensif, mencakup: (a)

siapa orang miskin itu?; (b) di mana mereka tinggal?; (c) mengapa mereka miskin?; (d) mengapa mereka tetap miskin?; (e) bagaimana persepsi mereka mengenai apa yang dimaksud dengan "miskin"?; dan (f) bagaimana usaha mereka sendiri untuk mengatasinya?.

2. Aktivitas pemberdayaan social hendaklah berfokus kepada perluasan asset (alam, fisik, financial, social, SDM, budaya) dan kemampuan mengelola asset-aset tersebut sehingga mampu memberikan system penghidupan yang lebih baik kepada masyarakat miskin.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alsop, Ruth; Mette Frost Bertelsen; Jeremy Holland. 2006. ***Empowerment in Practice: From Analysis to Implementation***. The World Bank. Washington DC.
- Bebbington, Anthony. 1999. ***Capital and Capabilities: A Framework for Analyzing Peasant Viability, Rural Livelihoods and Poverty***. World Development Vol. 27, No. 12, pp : 2021-2044, 1999.
- Chambers, Robert. 1995. ***Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?***. Journal : Environment and Urbanization Vol. 7 No. 1 1995.
- Conway, G dan R. Chambers. 1992. ***Sustainable Rural Livelihood : Practical Concepts for 21<sup>st</sup> Century***, IDS Discussion Paper 296 : IDS.
- Dharmawan, Arya Hadi. 1994. ***Farm Income and Financing in Rural Indonesia: A Case Study from West Kalimantan***. Institute of Rural Development, Georg August-University of Gottingen. Germany.
- Ellis, Frank. 1998. ***Household Strategies and Rural Livelihood Diversification***. The Journal of Development Studies; Vol 35/1, pp. 1-38.
- \_\_\_\_\_. 2000. ***Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries***. Oxford University Press. New York.
- Ependi, Engken Parid. 2004. ***Analisis Sumberdaya Nafkah dan Strategi Nafkah pada Dua Komunitas : Studi Kasus Komunitas Desa Bantarujeg Majalengka Jawa Barat dan Desa Cisarua Bogor Jawa Barat***. Skripsi Dep. Ilmu sosial Ekonomi Pertanian. IPB.
- Hardjono, Joan. 1990. ***Tanah, Pekerjaan, dan Nafkah di***

***Pemberdayaan, rumahtangga miskin, asset, Widiyanto***

- Pedesaan Jawa Barat***. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Husken, Frans. 1998. ***Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman : Sejarah Differensiasi Sosial di Jawa 1830-1980***. Grasindo. Jakarta.
- Iqbal, Moch. 2004. ***Strategi Nafkah Rumahtangga Nelayan: Studi Kasus di Dua Desa Nelayan Tangkap Kabupaten Lamongan Jawa Timur***. Tesis S-2 SPD; IPB; 2004.
- Marzali, Amri. 2003. ***Strategi Peisan Cikalong dalam Menghadapi Kemiskinan***. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Masithoh, Arifah Dewi. 2005. ***Analisis Strategi Nafkah Rumahtangga Petani Perkebunan Rakyat : Studi Kajian Perbandingan: Komunitas Petani Perkebunan Teh Ciguha Jawa Barat dan Komunitas Petani Perkebunan Tebu Puri Jawa Timur***. Skripsi Dep. Ilmu sosial Ekonomi Pertanian. IPB.
- Narayan, Deepa. 2002. ***Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook***. The World Bank. Washington DC.
- Odero, Kenneth K. 2007. ***Extending the Sustainable Livelihoods Framework***. Departement of Rural and Urban Planning. University of Zimbabwe
- Purnomo, Agustina Multi. 2006. ***Strategi Nafkah Rumahtangga Desa Sekitar Hutan: Studi Kasus di Kabupaten Kuningan***. Tesis S-2 SPD. IPB.
- Sajogyo. 1998. ***Dimensi Kemiskinan: Agenda Pemikiran Sajogyo***. Kumpulan Pemikiran Sajogyo dengan editor: Mukhtar Sarman. Pusat P3R-YAE.
- Usman, Marzuki. 1990. ***Pengantar dalam Industrialisasi Pedesaan***. Editor Sajogyo dan Mangara Tambunan. PT. Sekindo Eka Jaya. Jakarta.
- Wariso. 1996. ***Mengembangkan Peluang Bekerja dan Berusaha di Luar Pertanian di Pedesaan dalam Upaya Mengatasi Kemiskinan***. Bunga Rampai: Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia (Prof. Dr. Sayogyo 70 Tahun). ISI Cabang Bogor dan Grasindo. Jakarta
- White, Benjamin N.F. 1990. ***Agroindustri, Industrialisasi Pedesaan, dan Transformasi Pedesaan***. Bunga rampai : Industrialisasi Pedesaan, Editor : Sayogyo dan Mangara

***Agritexts Volume 40 Edisi 2 Oktober 2016***

Tambunan. PT. Sekindo Eka  
Jaya. Jakarta.

Widiyanto. 2009. ***Strategi Nafkah  
Rumahtangga Petani Temba-  
kau di Lereng Gunung  
Sumbing: Studi Kasus di Desa***

***Wonotirto dan Campursari  
Kecamatan Bulu Kabupaten  
Temanggung.*** Tesis S-2 SPD.  
IPB.

Berita Resmi Statistik No. 47/IX/1  
September 2006.